

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN JEPARA

Oleh :

Yustisia Prajna Paramita, AUFARUL MAROM, DEWI ROSTYANINGSIH

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. Soedharto SH, Kampus Tembalang, Semarang  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRACT

*The implementation of the waste management policies in the county of jepara referring to perda no 3 in 2009, waste management policies in the county of jepara is government program in order penanggulangan pileup of rubble produced by people and their own in the activities of the reduction and waste management.*

*The process of the implementation of the waste management policies in the county of jepara not separated from a factor that supports and hinder. Based on the theory of a van metter, van horn and edwards iii factor that supports and hinder keputusan standart policy, and the target the structure of the bureaucracy, resources, the disposition and communications.*

*For the implementation of the policy of waste management in the county of jepara uses the method research qualitative descriptive in nature. With research site district jepara, in the region of and respondent government apparatus, covering janitor and city people and uses the technique research interview deep, documentation and observation*

*Factor inhibitors of existing in the implementation of the waste management in the county of jepara are the reduction and waste management which is has not yet been optimal, standart and target a policy that only the outlines course, the structure of the bureaucracy that is less effective, still lack of resources and pengkomunikasian a less well on the purpose of the implementation of the waste management from the government to the public.*

**Keyword : implementation , process , supporting factors , hindering factors**

## ABSTRAKSI

*Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara mengacu pada Perda No 3 Tahun 2009, kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara merupakan program pemerintah dalam rangka penanggulangan timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat serta mekanismenya dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.*

*Proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara tidak lepas dari faktor yang mendukung dan menghambat. Berdasarkan teori dari Van Metter, Van Horn dan Edwards III faktor yang mendukung dan menghambat berupa standart dan sasaran kebijakan, struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi.*

*Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dengan situs penelitian di wilayah Kabupaten Jepara, dan subyek penelitian meliputi aparat pemerintah, petugas kebersihan dan masyarakat kota dan menggunakan teknik penelitian wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi*

*Faktor penghambat yang ada dalam implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara adalah kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang belum optimal, standart dan sasaran kebijakan yang hanya garis besarnya saja, struktur birokrasi yang kurang efektif, masih kurangnya sumber daya dan pengkomunikasian yang kurang baik mengenai tujuan implementasi pengelolaan sampah dari pemerintah kepada masyarakat.*

**Kata kunci : implementasi , proses, faktor pendukung, faktor penghambat**

## 1.PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Jepara sebagai kota yang sedang berkembang, juga tidak luput dari permasalahan sampah. Sampah yang ada di Kabupaten Jepara merupakan timbulan dari kegiatan rumah tangga, pertokoan, perkantoran dan pasar. Jumlah timbulan sampah apabila tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan lingkungan menjadi tidak bersih, sehat dan nyaman. Di dalam pengelolaan sampah ada kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan sampah yang baik.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara masih mengalami beberapa permasalahan dilapangan, diantaranya seperti bagian-bagian peraturan yang tercantum didalam Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara belum seluruhnya bisa diimplementasikan dengan baik, dan dalam kegiatan penanganan dan pengurangan sampah masih belum bisa dilaksanakan dengan baik, karena jumlah timbulan sampah yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, belum semua timbulan sampah bisa terangkut ke TPA, masih kurangnya sarana prasarana yang menunjang dalam kegiatan pengelolaan sampah serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mengenai kajian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara.

## **1.3 Teori**

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah menggunakan teori dari Van Metter Van Horn dan Edward III yang dilihat dari standart dan sasaran kebijakan, struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi.

## **1.4 Metode Penelitian**

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di kabupaten Jepara menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara serta mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam implementasi Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara.

Dan situs penelitian di wilayah Kabupaten Jepara Kecamatan Kota yang tersebar diwilayah kelurahan yang memperoleh layanan kebersihan dari Dinas Cipta Karya. Informan dalam penelitian ini meliputi aparat-aparat pemerintah dari Dinas Cipta Karya, petugas-petugas kebersihan dan masyarakat Kecamatan Kota sebagai pengguna jasa layanan kebersihan. Dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks/tulisan, kata-kata tulisan dan tindakan atau peristiwa dalam kehidupan sosial. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Dalam analisis dan interpretasi data terdapat reduksi data yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian terdapat penyajian data, kumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Conclusion drawing/verification dimana peneliti mencoba mengambil kesimpulan dari kesimpulan yang kabur menjadi jelas, karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara**

Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara keseluruhan sudah mengalami progress, namun didalamnya masih terdapat kendala-kendala yang ada di lapangan. Sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dikategorikan kedalam ruang lingkup sampah seperti yang disebutkan diatas, sebelum memasuki pada tahap selanjutnya yaitu pengolahan sampah.

Kegiatan pemilahan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan menyediakan tong sampah khusus sampah organik dan sampah non organik. Karena dengan penyediaan tempat sampah organik dan non organik diharapkan dapat mempermudah kinerja petugas lapangan dalam hal pengolahan sampah. Namun kenyataan dilapangan yang diungkapkan oleh para informan tetap saja petugas lapangan melakukan kerja dua kali yaitu adanya pemilahan sampah dan pengolahan sampah, hal ini dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi dari perbedaan kedua tempat sampah tersebut. Hal ini bisa dikarenakan pada kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya dijelaskan tentang perlunya pemilahan sampah yang juga dilakukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang perlunya pemilahan sampah, selain itu dalam struktur birokrasi yang berkaitan dengan jumlah pelaksana lapangan dalam pengelolaan sampah juga belum memadai, hal ini yang menyebabkan pemilahan sampah belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik.

Timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tiap tahun mengalami kenaikan, seperti data terakhir pada tahun 2013 menurut Dinas Cipta Karya Kabupaten Jepara timbulan sampah yang dihasilkan per hari mencapai 686.486 m<sup>3</sup> dan yang terangkut 420 m<sup>3</sup>. Dengan melihat besarnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan per hari tentu perlu dilakukan kegiatan pembatasan timbulan sampah. Pembatasan timbulan sampah saat ini belum bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah, hal ini dikarenakan pembatasan timbulan sampah harus berasal dari sumber sampah. Sumber sampah seharusnya yang melakukan tindakan

pembatasan timbulan sampah seperti pemakaian kemasan yang hanya satu kali pakai bisa menyebabkan timbulan sampah semakin banyak. Pemerintah daerah saat ini hanya melakukan pembatasan timbulan sampah dengan tindakan represif yaitu lebih menanggulangi sampah ketika sampah sudah menumpuk semakin banyak.

Pemerintah daerah seharusnya melakukan tindakan preventif agar timbulan sampah yang dihasilkan tidak terlalu banyak, misalnya dengan lebih intensif melakukan kegiatan sosialisasi tentang penggunaan barang yang tidak hanya satu kali pakai ataupun memanfaatkan barang yang masih bisa untuk dimanfaatkan kegunaannya sehingga tidak menjadi sampah, keintensifan pemerintah dalam melakukan sosialisasi saat ini bisa dikatakan belum sepenuhnya intensif karena sosialisasi hanya dilakukan satu tahun sekali. Dalam hal pembatasan timbulan sampah memang diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah karena tanpa peran masyarakat yang mendukung program pemerintah dalam kegiatan pembatasan timbulan sampah, tidak akan bisa tercapai dengan optimal dan jumlah timbulan sampah semakin tahun akan bertambah.

### **3.2 Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara**

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009. Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara merupakan program pemerintah dalam rangka penanggulangan timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat serta mekanismenya dalam kegiatan penanganan dan pengurangan timbulan sampah. Berdasarkan penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara, ternyata masih terdapat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki jika dilihat dari pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal. Jumlah timbulan sampah dari tahun ke tahun masih mengalami kenaikan secara konstan 3% setiap tahunnya. Pada kegiatan penanganan sampah secara keseluruhan juga belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal, karena jumlah timbulan sampah yang dihasilkan perhari belum semua bisa tertangani dan terangkut ke TPA.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, terdapat spesifikasi sampah menurut sifat dan jenisnya. Dalam kegiatan pengolahan sampah yang tertera di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara, terdapat kegiatan pengurangan sampah faktor yang mendorong adalah respon implementor

dalam kegiatan pengurangan sampah sudah baik, kognisi implementor dalam kegiatan pengurangan sampah sudah baik. Namun yang menjadi faktor penghambat adalah struktur birokrasi belum efektif dalam menangani kegiatan pengurangan sampah, belum adanya divisi-divisi khusus dalam kegiatan pengurangan sampah dan tugas pokok pegawai belum mencakup keseluruhan tugas kegiatan pengurangan sampah.

Didalam kegiatan pengurangan sampah terdapat kegiatan pembatasan timbulan sampah namun yang menjadi faktor penghambat didalam kegiatan pembatasan timbulan sampah, belum ada tindakan yang bisa dilakukan oleh Pemda terkait dengan pembatasan timbulan sampah, belum ada standart dalam kegiatan pembatasan timbulan sampah secara jumlah.

Pada kegiatan pendauran ulang sampah yang menjadi faktor penghambat meliputi belum ada alat yang digunakan untuk mendaur ulang sampah anorganik, belum ada standart dalam mekanisme pendauran ulang sampah yang bersifat organik dan anorganik, belum ada sosialisasi yang dilakukan sebagai komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang kegiatan pendauran ulang sampah.

Kegiatan pemanfaatan kembali sampah yang menjadi faktor penghambatnya meliputi masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang fungsi pemanfaatan kembali sampah sehingga masih banyak sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah. belum dijelaskan dan diberikan contoh mengenai bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pemanfaatan sampah.

Selanjutnya dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah terdapat kegiatan penanganan sampah dan yang menjadi faktor pendorong yaitu sudah ditetapkannya standart dalam kegiatan penanganan sampah yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Respon implementor dalam kegiatan penanganan sampah sudah baik dan kognisi implementor dalam kegiatan penanganan sampah sudah baik. Namun, didalam kegiatan penanganan sampah terdapat faktor yang menjadi penghambat yaitu struktur birokrasi belum efektif dalam kegiatan penanganan sampah, belum adanya divisi-divisi khusus untuk kegiatan penanganan sampah, tugas pokok pegawai belum mencakup keseluruhan tugas kegiatan penanganan sampah, belum semua aparat mempunyai komitmen yang baik dalam kegiatan penanganan sampah. masih kurangnya dana dalam kegiatan penanganan sampah.

Pada kegiatan pemilahan sampah yang menjadi faktor penghambat masyarakat dan petugas kebersihan belum sepenuhnya menjalankan kegiatan pemilahan sampah. pada kegiatan pengumpulan sampah yang menjadi faktor penghambat yaitu belum semua sampah terkumpul di TPS sehingga masih terdapat lingkungan yang tercemar sampah, belum semua TPS menggunakan standart bak tertutup, masih kurangnya TPS sebagai sarana pengumpulan sampah, masih

kurangnya tong sampah dan petugas kebersihan dalam kegiatan pengumpulan sampah.

Kegiatan pengangkutan sampah yang menjadi faktor penghambat yaitu masih kurangnya sarana pengangkut sampah sehingga tidak semua sampah bisa terangkut di TPA. Pada kegiatan pengolahan sampah yang menjadi faktor pendorong yaitu sudah ada pengolahan sampah organik, dan yang menjadi faktor penghambat adalah belum ada alat yang digunakan untuk mengolah sampah anorganik

Selanjutnya pada pemrosesan akhir sampah dengan bentuk pengembalian sampah dan hasil pengolahan sampah secara aman. Saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jepara dengan menggunakan pengolahan air lindi. Pengolahan air lindi merupakan pengolahan air dari hasil timbunan sampah yang mengandung senyawa berbahaya dan merusak lingkungan, dilakukannya pengolahan air lindi agar air dari timbunan sampah bisa dikembalikan ke lingkungan dengan aman.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal. Jumlah timbulan sampah dari tahun ke tahun masih mengalami kenaikan. Pada kegiatan penanganan sampah secara keseluruhan juga belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal, karena jumlah timbunan sampah yang dihasilkan perhari belum semua bisa tertangani dan terangkut ke TPA.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara, menemui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara. Apabila dilihat dari standart dan sasaran kebijakan adalah belum adanya standart khusus dalam pembatasan jumlah timbulan sampah, selain itu masih terdapat banyak TPS yang belum memenuhi standart dari pemerintah yaitu dengan menggunakan TPS bak tertutup yang berwawasan lingkungan, selain itu penggunaan sistem pengolahan sampah yang ada di TPA Bandengan, Gemulung dan Krasak belum menggunakan sistem control landfill yang sudah menjadi standart sistem pengolahan sampah pada daerah Kabupaten atau Kota.

Dalam struktur birokrasi yang khususnya terdapat pada bidang kebersihan Dinas Cipta karya, struktur birokrasinya tidak terlalu panjang namun belum sepenuhnya bisa efektif. Karena belum ada divisi-divisi khusus dalam kegiatan

pengurangan dan penanganan sampah sehingga implementasi pengelolaan sampah kurang optimal.

Sumber daya yang mendukung keberhasilan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara seperti sumber daya manusia yang ada saat ini hanya 48 petugas kebersihan dan diperlukan adanya penambahan personil untuk menunjang keberhasilan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara.

Disposisi yang ada saat ini mengenai respon dan kognisi implementor sudah baik sedangkan komitmen aparat dalam menjalankan implementasi kebijakan belum sepenuhnya baik karena belum semua aparat dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab, masih ada aparat yang tidak menggunakan waktu kerjanya disaat jam kerja.

Implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara dapat berhasil apabila dikomunikasikan dengan baik. Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat belum sepenuhnya bisa optimal. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan hanya satu tahun sekali itupun dilakukan oleh BLH (Badan Lingkungan Hidup) selain itu pemasangan baliho, poster ditempat-tempat umum belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena belum ada perbaikan pada baliho sehingga fungsi penyampaian informasi yang menggunakan baliho kurang sepenuhnya berhasil.

## **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti memberikan beberapa rekomendasi antara lain

1. Perlu adanya penambahan divisi-divisi dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, dari penambahan divisi-divisi yang menangani kegiatan pengurangan dan penanganan sampah diharapkan bisa lebih melaksanakan implementasi pengelolaan sampah dengan lebih optimal.
2. Perlu adanya standart khusus dalam kegiatan pembatasan timbulan sampah, sehingga timbulan sampah yang dihasilkan selain bisa ditangani juga bisa dicegah agar timbulan sampah yang dihasilkan tidak semakin bertambah setiap tahunnya.
3. Menambah jumlah petugas kebersihan dilapangan khususnya penyapu jalan dan pengangkut sampah, karena saat ini Dinas Cipta Karya hanya mempunyai 48 petugas kebersihan lapangan.
4. Meningkatkan komitmen petugas kebersihan dan aparat pemerintah dengan cara memberikan motivasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk menjalankan tugasnya dengan optimal ketika jam kerja, termasuk pada petugas

kebersihan ketika membersihkan sampah disaluran-saluran air dan membersihkan lingkungan yang masih tercemar oleh sampah.

5. Perlu adanya pemasangan baliho ataupun poster mengenai kesadaran akan kebersihan lingkungan di tempat-tempat umum, selain itu perlu dilakukannya sosialisasi oleh Dinas Cipta Karya secara rutin tentang pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Minimal enam bulan sekali, agar implementasi pengelolaan sampah yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat bisa terwujud.

6. Dalam menunjang kegiatan pengurangan sampah masyarakat bisa menggunakan sistem bank sampah dengan memanfaatkan sampah-sampah yang bisa untuk didaur ulang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku :

Abidin, Said Zainal, 2002, Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.

Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung.

Dwijowijoto, Riant Nigroho, 2003, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta

Islamy, Irvan. 1988. Kebijakan Publik. Jakarta : Karunia

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya : Bandung.

Nugroho, Riant, 2008, Public Policy (Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate - Metode Penelitian Kebijakan), Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta.

Pasolong, Harbani, 2007, Teori Adminisrasi Publik, Alfabeta, Bandung.

Subarsono, AG, 2008, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sugiono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta : Bandung.

Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003, Kebijakan Publik yang Membumi (Konsep, Strategi dan Kasus), Kerjasama Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia-Lukman Offset, Yogyakarta.

Winarno, Budi, 2005, Teori Dan Proses kebijakan Publik, Media Pressindo, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2005, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Sumber Lain :

<http://us-arrohman.blogspot.com/2012/03/sejarah-kota-jepara.html>.

Data BPS Kabupaten Jepara 2010.

Data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara 2009.

Data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara 2012.

Jepara Dalam Angka 2010.

Data Manajemen Persampahan Kota Jepara 2011.

Data Manajemen Persampahan Kota Jepara 2012.

Data Pemerintah Kabupaten jepara Dinas perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan, 2010.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jepara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Disetujui oleh Dosen Pembimbing I

Drs. Aufarul Marom, Msi

NIP. 19600528.198703.1.001